



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 148936

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 802.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 381 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 127.600.000
2. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/224 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 177.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 1DY SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JB 420 GRAND VITARA JLX MOBIL MENUMPANG Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. 15.017.840

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 87.785.600

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.082.403.440

III. HUTANG

Rp. 347.138.177

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 735.265.263



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.